

# **PERANAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMATERA UTARA**

**ZULIA HANUM,SE,M.Si**

Jurnal IlmiahKultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No.1 Sept 2010 UMN Alwashliyah

## **Abstrak**

Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Dispenda Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan lembaga pemerintahan, yang sangat memerlukan perencanaan dan pengawasan sehingga seluruh target (anggaran) yang diharapkan dapat direalisasikan dengan baik, dan penerimaan daerah meningkat sesuai dengan harapan.

Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Anggaran penerimaan pajak daerah merupakan salah satu jenis anggaran pendapatan. Anggaran penerimaan pajak daerah dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Sumatera Utara periode lalu.

Upaya peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Dispenda Propinsi Sumatera Utara, belum mampu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang diharapkan, serta anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang baik sebab hasil realisasi masih jauh dari harapan yang diinginkan.

## Tinjauan Teoritis

### 1. Pajak Daerah

Menurut Soemitro (2008,hal 70) “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah

### 2. Pengertian Anggaran

Menurut Sirait (2006, hal 6)” Anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan. Rencana ini mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.

### 3. Pengertian Perencanaan dan Pengawasan

Perencanaan merupakan pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijaksanaan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

## Pembahasan

### 1. Hasil Observasi

Dari hasil observasi yang dilakukan dan yang telah diamati agar hasilnya objektif maka diminta pada pegawai bersangkutan untuk mengisi lembar observasi, maka didapat hasil observasi sebagai berikut:

Tabel IV.9

Hasil Instrumen Kisi –kisi Observasi

No.Pertanyaan	Nilai Tabulasi
1	4
2.	4
3	2
4	3
5	3
6	1
7	2
8	3
9	3
10	2
11	2
12	1
13	2
14	2

Sumber: Hasil Observasi, 2010

Dari tabel jawaban tersebut dapat diketahui, bahwa hasil observasi maka akan diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.10**  
**Skala Observasi**

Keterangan	Nilai	Skor	Jumlah
<b>Sangat tepat</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<b>Tepat</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
<b>Kurang Tepat</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Tidak Tepat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

<b>Total Skor</b>	<b>34</b>
-------------------	-----------

Sumber: Data Primer Diolah 2010

Untuk menguji hasil penelitian berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan terhadap 12 pertanyaan, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata (M). Dari nilai tabulasi diketahui dimana jumlah skor yang diperoleh 30 jumlah skor ideal (bila responden menjawab) skor tertinggi pada setiap butir =  $4 \times 12 = 48$  (4= skor Tertinggi, 12= jumlah pertanyaan), jadi nilai rata-ratanya adalah:

$$X = \frac{34}{14} = 2,43$$

Dari hasil yang diperoleh dari perhitungan mean adalah sebesar 2,43. Berdasarkan kategori penilaian tersebut nilai ini terletak pada internal 1,76-2,50 dengan kategori sangat tepat sampai tidak tepat. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan maka diperoleh nilai sebesar 2,43 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik

#### Kesimpulan

Dari penelitian dan didukung data yang ada maka penulis membuat kesimpulan bahwa fungsi anggaran sebagai alat pengawasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil data maka di ketehui bahwa anggaran penerimaan daerah yang dibuat oleh dispenda provinsi sumatera utara, dijadikan sebagai program kerja, sistem koordinasi semua sub dinas dalam instansi dan sebagai alat pengawasan upaya pencapaian APBD sehingga pembangunan yang ingin dicapai dapat di realisasikan dengan baik.
2. Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh dinas pendapatan daerah sumatera utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi maka diperoleh hasil nilai sebesar 2,43 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

#### Daftar Pustaka

- Hadibroto (2004). Anggaran Suatu Pendekatan. Edisi kedua, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Balai penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Handoko, Hani (2006). Manajemen, Yogyakarta; Balai penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Harahap, Sofyan Syafri (2001). Budgeting, peranggaran Perencanaan lengkap untuk membantu manajemen, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Harnanto (2004). Anggaran; Suatu Pendekatan, Edisi Kedua, Cetakan Kesatu, Yogyakarta; Balai penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Gajah Mada.
- Ikatan Akuntan Indonesia.(2007). Standar Akuntansi Keuangan. Edisi Revisi Jakarta: Salemba Empat.

- Mardiasno (2008) Perpajakan, Edisi Revisi Cetakan Kelima, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Mulyadi (2000). Penganggaran, Edisi Kelima, Cetakan Keenam, Yogyakarta; Aditya Media.
- Mulyo agung (2007). Perpajakan Indonesia Teori Dan Aplikasi. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta, Penerbit Dinamika Ilmu.
- Munandar (2000). Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja, Edisi Pertama, Yogyakarta; BPFU-UGM.
- Muhammad Nafarin (2004). Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta; Salemba Empat.
- Sirait, Justine (2006). Anggaran Sebagai Alat Bantu Bagi Manajemen, Cetakan Pertama, Jakarta; Gramedia.
- Sugiono (2000). Metode Penelitian Bisnis, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Bandung; Alfabeta.
- Swasta, Basu, DH (2005). Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Yogyakarta; Liberty.
- Tunggal, Amin Widjaja (2005). Dasar-dasar Budgeting, Cetakan Pertama, Jakarta; PT. Rineka Cipta.